

Perbaikan Pemeriksaan Laporan Keuangan

Kubu Raya Sabet Rangking II

SUNGAI RAYA—Kepala Inspektorat Kubu Raya, Ardanihans mengatakan di usia pemerintahan yang baru tiga tahun dan baru menjalankan satu tahun APBD tahun 2009 dan APBD 2010 (masih dalam proses, red) tidak membuat kabupaten ini minim prestasi. Penyelesaian Perbaikan Pemeriksaan Laporan Keuangan Inspektorat Kalbar, Kubu Raya berada di posisi terbaik.

“Kita, berada di posisi kedua terbaik, setelah Kabupaten Sekadau dalam hal penyelesaian tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalbar. Ini ditetapkan ketika seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalbar melakukan rapat koordinasi dan evaluasi caturwulan ke tiga tahun 2010 di Kabupaten Kayong Utara,” katanya.

Menurutnya setelah rapat koordinasi dan evaluasi di Kabupaten Kayong Utara, rencananya akan dilakukan di Kubu Raya. “Insya Allah kalau tidak ada halangan bulat Mei 2011, kita men-

jadi tuan rumah,” ucapnya.

Mantan Kadis Pertanian Kubu Raya ini menambahkan prestasi tersebut, tentu saja diperoleh karena kerja keras dan kerja sama seluruh SKPD dalam hal perbaikan laporan keuangan pemeriksaan Inspektorat Kalbar.

Ia menuturkan tentang temuan BPK dalam APBD tahun 2009, terkait opini tidak wajar diperinci kalau seluruh temuan tersebut sudah ditindaklanjuti. “Sesuai jadwal BPK, paling lambat perbaikan itu diselesaikan 31 Agustus 2010 dan sudah diserahkan kepada Bupati Kubu Raya. Kemudian pada 1 September 2010, perbaikan itu telah diserahkan kepada BPK,” ujarnya kembali.

Ardanihans mengatakan, temuan-temuan yang menyangkut administrasi juga langsung ditindaklanjuti berupa peringatan bupati dan teguran bupati kepada SKPD yang juga telah dilampirkan dalam laporan ke BPK. Ada juga laporan masalah Perubahan Tuntutan Ganti Rugi.

Semuanya sudah ditindaklanjuti masing-masing SKPD. “Tanda bukti setorannya sudah dilampirkan juga,” ungkapnya.

Hanya saja dari masalah tersebut, lanjutnya, hanya temuan penilaian aset yang masih belum tuntas. Masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Pasalnya, Kabupaten Kubu Raya masih dalam masa transisi dari kabupaten induk. “Kita belum selesai penilaian kembali. Artinya, masalah aset masih berproses dan terus ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia menerangkan Kabupaten Kubu Raya, baru setahun melaksanakan APBD (2009, red). Intinya semua temuan itu sudah diperbaiki dan masih menunggu tanggapan dari BPK. Tentunya juga memerlukan waktu. “Kita tunggu saja hasilnya,” ujarnya seraya menambahkan terkait temuan biaya konsultasi yang juga dipertanyakan, merupakan biaya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan. “Bukan biaya konsultasi perjalanan bupati,” timpal dia. (den)